



KORUPSI

Kejati Kejara Kasus Rp 200 M

DENPASAR-Diam-diam tim penyidik dari Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Tinggi (Kejati) Bali membidik kasus dugaan tindak pidana korupsi pemberian kredit investasi di Bank Pembangunan Daerah Bali (BPD) Bali. Tak main-main, nilai kredit investasi yang tengah disidik tim penyidik dari korps Adhiyaksa Bali ini memiliki nilai fantastis, ratusan miliar.

Penyidik juga telah melakukan pemanggilan sejumlah orang di lingkungan BPD Bali untuk diperiksa. Informasi yang didapat koran ini menyebutkan bahwa terungkapnya kasus kredit investasi di BPD Bali ini berawal dari adanya rencana investasi pembangunan hotel mewah di kawasan Jalan Bypass Ngurah Rai ■

► Baca *Kejati...* Hal 27

Jaksa Mengaku Ada Pemeriksaan

■ KEJATI

Sambungan dari hal 17

"Pembangunan fisiknya berhenti dan mangkrak, sehingga kredit macet," ujar sumber, Rabu kemarin (23/8).

Selain itu, adanya dugaan tindak pidana korupsi dalam kasus ini, lanjut sumber karena penyidik menengarai banyaknya keganjilan dari sejak awal pengajuan kredit, proses pencairan kredit hingga objek yang digunakan sebagai agunan.

Dijelaskan, selain diduga proses pengajuan kredit tidak sesuai dengan sistem kredit perbankan, nilai atau jumlah dana yang dikucurkan juga tidak sebanding dengan nilai agunan. "Hasil investigasi dan penyelidikan, ternyata objek yang digunakan untuk lokasi investasi merupakan tanah sewa," ungkapnya.

"Apalagi nilai atau dana yang dikucurkan tidak kecil, yakni mencapai kisaran Rp 200 miliar. Dana itu dikucurkan ke dua perusahaan selaku kreditur. Tapi proses pencairannya sangat cepat dan tidak wajar," tandasnya.

Adakah dugaan adanya permainan oknum BPD Bali dengan pihak kreditur? Ditanya demikian, sumber menyatakan tidak menutup kemungkinan. Pasalnya, selain

keganjilan dalam proses pengajuan sampai proses pencairan yang sangat cepat, analisis kredit dari dua kreditur berbeda itu merupakan orang yang sama. "Silakan nanti dikonfirmasi ke penyidik. Secara umum dugaan kami analisis kredit tidak memenuhi rambu-rambu dalam proses pencairan, analisis kredit hanya melihat dari asumsi prospek investasi sehingga dicairkanlah dana itu," bebernya lagi.

Terkait informasi sumber, Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasi Penkum) Kejati Bali, Edwin Beslar saat dikonfirmasi via telepon kemarin membenarkan. Hanya saja, jaksa asal Manado ini masih enggan menjelaskan. "Memang ada pemeriksaan. Tapi kami belum bisa menerangkan detail karena masih sangat awal. Kami tidak ingin dan khawatir dengan masih berjalannya proses, apa yang kami sampaikan justru menimbulkan bias dan ada upaya-upaya dari pihak tertentu untuk menghilangkan alat maupun barang bukti," terang Edwin.

"Kami mohon kawan media bersabar dulu. Nanti setelah proses penyidikan rampung, pasti kami akan sampaikan kepada media. Memang pemanggilan dan pemeriksaan sudah berjalan," pungkasnya. (pra/pit)

Edisi : Kamis, 24 Agustus 2017

Hal : 17 dan 27



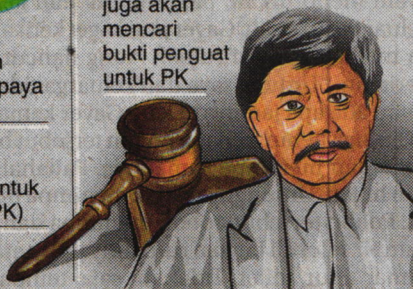
Winasa Siapkan PK

Alasan Winasa Ajukan PK

- Winasa melalui penasihat hukumnya menyatakan masih optimistis untuk menempuh upaya hukum lanjutan
- Winasa melihat masih ada peluang mencari bukti baru (*novum*) yang bisa diajukan untuk materi Peninjauan Kembali (PK)
- Dengan adanya *novum* itu diharapkan bisa mengurangi

hukuman yang sudah turun dalam kasasi

- Winasa melalui pengacaranya juga akan mencari bukti penguat untuk PK



GRAFIS: GT DEWANTARA/RADAR BALI

Semeton Tetap Memberi Dukungan

DENPASAR- Turunnya putusan Kasasi Mahkamah Agung (MA) RI 7 tahun penjara bagi mantan Bupati Jembrana, I Gede Winasa tak membuatnya berdiam saja. Mantan orang nomor 1 Jembrana yang terjerat kasus korupsi beasiswa Stikes dan Stitna ini bakal mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali (PK) ke Mahkamah Agung (MA).

Hal ini dituturkan penasihat hukum Winasa, Wayan Gede Mahardika, saat dikonfirmasi, Selasa kemarin (22/8). Dia menegaskan bahwa meski secara langsung belum melihat salinan putusan, namun dengan turunnya petikan putusan Kasasi MA-RI, pihaknya masih akan terus berupaya untuk mencari bukti baru (*novum*). Ini sebagai langkah upaya hukum lanjutan bagi kliennya.

"Dari komunikasi kami selaku kuasa hukum Pak Winasa, dengan naiknya hukuman, maka masih

ada satu upaya hukum PK," terang Gede Mahardika.

Hanya saja, sebelum memutuskan menempuh PK, kata Mahardika, pihaknya ingin agar *novum* kliennya benar-benar sesuai fakta dan memiliki bukti penguat. "Agar *novum* yang nanti diajukan tidak mudah begitu saja dipatahkan. Karena PK ini satu-satunya kesempatan dan senjata terakhir yang bisa kami pakai," imbuhnya.

Selain itu, dengan menumpuknya sejumlah kasus korupsi yang menjerat kliennya ■

► Baca Winasa... Hal 31

Edisi : Kamis 24 Agustus 2017

Hal : 21



Keluarga Masih Terpukul Nasib Winasa

■ WINASA

Sambungan dari hal 21

kata Mahardika, dari hasil komunikasi dengan Winasa, kliennya menyatakan tak akan pernah gentar. "Klien kami tidak surut dan terus optimistis. Artinya kalau mengutip dari pernyataan langsung beliau. Beliau akan tetap berjuang mencari keadilan karena diberlakukan tidak adil meskipun risikonya lebih berat," imbuhnya.

Bahkan, lanjut dia, kliennya siap mati untuk memperjuangkan keadilan. "Prinsipnya untuk kepentingan penegakan hukum, beliau akan terus berjuang," tandasnya.

Tekad Winasa untuk tetap menempuh upaya hukum itu kata Mahardika karena kliennya berkeyakinan masih banyak pihak lain yang bisa ditelusuri. "Kalau memang tujuannya menurut beliau untuk benar-benar menegakkan keadilan dan kebenaran," ujarnya.

Saat ditanya terkait novum sebagai bahan mengajukan PK, menurut Mahardika salah satunya

adalah dengan mencari bukti penguat. "Apalagi kasus Stikes dan Stitna ini kan cukup lama, jadi kami harus pelan-pelan dan hati-hati. Kami masih punya waktu cukup, termasuk untuk kasus lain seperti Perdin yang saat ini masih dalam proses banding," tandasnya.

Sementara itu di Jembrana, sejumlah orang yang mengatasnamakan Semeton Winasa akan mengunjungi profesor dan dokter gigi yang saat ini di tahan di rumah tahanan negara (rutan) Kelas IIB Negara itu. Ini dilakukan untuk memberi dukungan.

Kepastian bahwa Winasa sudah menerima salinan putusan tersebut diungkapkan panitera Pengadilan Negeri (PN) Negara, Raden Tri Indiar Putranta, Selasa kemarin (22/8). Menurutnya, putusan MA tersebut dikirim ke pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Denpasar.

Sementara itu, I Komang Adiyasa selaku ketua Semeton Winasa mengungkapkan keprihatinannya atas putusan yang telah dijatuhkan kepada Winasa. "Saya selaku se-

meton sangat sedih dan prihatin dengan vonis yang dijatuhkan kepada guru Winasa kenapa harus bertahap seperti ini," ujarnya.

Kasus yang menyeret Winasa selama jadi Bupati Jembrana dua periode ini, semestinya ada pertimbangan-pertimbangan lain yang bisa meringankan hukuman. Misalnya perubahan Jembrana saat dipimpin Winasa, kebijakan-kebijakannya dirasakan oleh masyarakat.

"Mungkin beliau salah secara administratif. Tidakkah ada pertimbangan lain agar bisa meringankan vonis yang dijatuhkan. Hargailah beliau. Beliau pernah memimpin kita, beliau yang melakukan perubahan di Jembrana," ungkapnya.

Selain itu, melihat kondisi kesehatan dan usia Winasa, menurutnya, tidak ada pertimbangan agar Winasa bisa menikmati masa-masa tua serta membimbing generasi sekarang dengan pikiran-pikiran cemerlang untuk membangun Jembrana ke arah yang lebih baik. "Kerinduan sebagian mas-

yarakat juga sangat mengharapkan pikiran-pikiran beliau bisa kembali memberi warna pembangunan Jembrana. Winasa sebagai tokoh Semeton yang mampu memberi motivasi dan rasa bangga pernah memberi yang terbaik buat Jembrana" terangnya.

Semeton Winasa ini sering menjenguk Winasa, terakhir saat Winasa diputus 4 tahun pidana penjara atas kasus korupsi perjalanan dinas. Setelah ada putusan kasasi MA ini, Adiyasa mengaku akan datang ke Rutan Kelas IIB Negara untuk memberi dukungan agar Winasa tabah menjalani masalah yang dihadapi.

Rentetan kasus yang dialami I Gede Winasa selain mengundang simpati pendukung, juga membuat keluarga Winasa terpukul. Salah satu keluarga Winasa mengungkapkan bahwa Winasa adalah saudara dan juga bapak di keluarganya. Karena itu, keluarga memohon tidak ada lagi pihak-pihak yang mengungkit lagi permasalahan selama menjadi Bupati Jembrana selama dua periode. "Kalau bisa kenapa just-

ru permasalahannya diulur-ulur sampai panjang dan banyak begini," ungkap Made Wijana, sepupu I Gede Winasa, kemarin.

Keluarga Winasa sangat ber-

harap semua permasalahan yang menimpa Winasa cepat selesai agar bisa segera pulang. Sebagai salah satu warga yang dituakan di Kelurahan Tegal Cangkring,

sangat berharap Winasa ada di rumah dan bersama masyarakat. "Sekarang juga ada upacara adat, tapi tidak boleh keluar," ungkapnya. (pra/bas/pit)



BPK Sedunia Bahas 17 Program Audit

DENPASAR – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI bersama dengan lembaga serupa dari 10 negara tengah membahas 17 pokok program rencana kerja di Hotel Anvaya, Tuban, Badung, kemarin (23/8). Ditemui di Hotel Anvaya kemarin, Ketua BPK RI Moermahadi Soerja Djanegara menyatakan, ada 17 program yang tergabung dalam Sustainable Development Goals (SDG) yang dijadikan pembahasan dalam pertemuan tersebut.

Pokok bahasan ini merupakan langkah implementasi dari program-program tersebut di 2030 mendatang. Namun hanya beberapa saja yang bisa

diterapkan di Indonesia dan sudah menjadi bahasan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). “Misalnya pengentasan kemiskinan, masalah lingkungan hidup, kesehatan dan infrastruktur. Dan ini nyambung dengan rencana pemerintahan kita,” ujar Moermahadi Soerja Djanegara.

Kata Moermahadi, harapan dari pelaksanaan kegiatan ini hingga 2030 tidak ada lagi rakyat miskin dan berbagai permasalahan yang membelit untuk kesejahteraan. Saat ini, kata dia, tinggal bagaimana metode penerapannya. “Tugas BPK adalah menyinkronkan agar bagaimana program itu bisa

tercapai dengan mengaudit kinerja di masing-masing negara. Karena ini kan menjadi target PBB,” jelasnya.

Lebih lanjut pria kelahiran Bandung ini mengungkapkan, dari Indonesia sebenarnya beberapa dari program yang menjadi pembahasan sudah menjadi rencana pembangunan berkelanjutan. Namun dari seluruh rencana ini tidak bisa tercapai semua. “Tiap negara juga belum tentu tercapai semua, kalau pun negara maju, paling hanya beberapa saja,” terang Moermahadi. Disinggung mengenai tingkat keberhasilan suatu negara dalam penyelesaian sebuah



TARGET DUNIA: Ketua BPK RI Moermahadi Soerja Djanegara saat menyampaikan beberapa program pemerintah Indonesia yang bakal jadi bahasan 17 rencana SDG dalam pertemuan working group di Anvaya Hotel, Tuban kemarin.

program yang disepakati, misalnya pengentasan kemiskinan, menurutnya, harus dilihat tolak ukurnya.

“Kalau kemiskinan sudah ada rencana itu, nah tinggal dilihat

apakah ukuran kemiskinan menurun. Kalau masih tetap atau justru meningkat, nah itu yang kami audit dan sampaikan untuk dijadikan bahan evaluasi,” pungkasnya. (zul/mus)